

**ANALISIS SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD BERDASARKAN UU
NO. 7 TAHUN 2017 PERSPEKTIF IMAM AL-MAWARDI**

SKRIPSI

Oleh

SAIFUL RIZAL

NIM. C94219104



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saiful Rizal
NIM : C94219104
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Analisis Sistem *Presidential Threshold* Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Perspektif Imam Al Mawardi

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Saiful Rizal
NIM. C94219104

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Saiful Rizal

NIM. : C94219104

Judul : Analisis Sistem *Presidential Threshold* Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017
Perspektif Imam Al Mawardi

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 29 Desember 2022

Pembimbing,



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, M.M.

NIP. 196803292000032001

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Saiful Rizal

NIM. : C94219104

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munakahas Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, 09 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munakahas Skripsi:

Penguji I

Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, M.H.
NIP. 196803292000032001

Penguji II

Dr. Muzahid, S.H., M.Hum.
NIP. 197803102005011004

Penguji III

Marli Candera, L.L.B (Hons), MCL.
NIP. 198506242019031005

Penguji IV

Ramdan Ilur, M. Hum.
NUP. 202111014

Surabaya, 13 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. KHUSNUL MUSTAFAH, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Saiful Rizal
NIM : C94219104
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : saifurrijalsyadiri97@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Sistem *Presidential Threshold* Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Perspektif Imam Al-Mawardi

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Januari 2023

Penulis

(Saiful Rizal)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Sistem Presidential Threshold Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Perspektif Imam Al-Mawardi” ini merupakan studi untuk menjawab dua permasalahan, yaitu: Bagaimana ketentuan sistem Presidential Threshold berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum? Bagaimana ketentuan sistem Presidential Threshold berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum perspektif Imam Al-Mawardi.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penelitian ini tergolong penelitian normatif yang menggunakan metode pengumpulan data melalui dokumentasi dan literatur review. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual untuk menemukan titik relevansi antara sistem Presidential Threshold berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dianalisis dengan pemikiran Al-Mawardi yang berkaitan dengan mekanisme pengangkatan kepala Negara.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan, bahwa ketentuan Presidential Threshold yang tercantum dalam UU No. 7 Tahun 2017 tetap dianggap sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945, karena adanya ketentuan Presidential Threshold merupakan kebijakan hukum terbuka bagi DPR dan Presiden, ketentuan Presidential Threshold juga sebagai upaya untuk mencari figur kepala Negara yang berkualitas. Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* menjelaskan terkait mekanisme pengangkatan kepala Negara, ada dua cara yang dapat ditempuh yaitu ditunjuk langsung oleh kepala Negara sebelumnya dan dipilih oleh Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdi. Untuk menjadi Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdi harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya: Pertama, memiliki ilmu yang mumpuni. Kedua, memiliki sifat adil. Ketiga, memiliki kemampuan untuk berpendapat dan hikmah. Jadi titik relevansi antara pemikiran Al-Mawardi yang berkaitan dengan pengangkatan kepala Negara dengan ketentuan Presidential Threshold berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 adalah pembatasan untuk dapat mencalonkan kepala Negara. Ketentuan Presidential Threshold yang tercantum dalam UU No. 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa untuk dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden partai politik atau gabungan partai politik harus memenuhi syarat perolehan suara minimal 20% dari jumlah kursi DPR dan 25% dari suara sah nasional sebelumnya, sedangkan dalam konsep yang ditawarkan Al-Mawardi terkait mekanisme pengangkatan kepala Negara melalui Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdi, untuk menjadi Ahlu al-Halli Wa al-'Aqdi harus memenuhi syarat sebagaimana disebutkan diatas.

Sesuai dengan kesimpulan diatas, perlu ada penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan prosedur pemilihan umum yang lebih efektif. Artinya, tanpa membedakan partai-partai politik peserta pemilu, baik partai baru atau lama. Karena dengan adanya ketentuan pemilu serentak dan pengaturan ambang batas (presidential threshold) memaksa partai politik untuk berkoalisi dengan partai lain.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Hasil Penelitian	9
E. Kegunaan Hasil Penelitian	10
F. Kajian Pustaka	10
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II IMAM AL-MAWARDI DAN SISTEM PENGANGKATAN KEPALA NEGARA DALAM POLITIK ISLAM	20
A. Biografi Dan Perjalanan Hidup Imam Al-Mawardi	20
B. Kepala Negara Perspektif Imam Al-Mawardi	26
C. Syarat Seorang Kepala Negara Perspektif Imam Al-Mawardi.....	28
D. Proses Pengangkatan Kepala Negara Perspektif Imam Al-Mawardi .	30
E. Sejarah Pengangkatan Seorang Pemimpin Dalam Politik Islam	34
BAB III SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 2017 ENTANG PEMILIHAN UMUM	43
A. Sistem Pemilihan Presiden & Wakil Presiden Dalam Sejarah Pemilihan Umum Di Indonesia	43

B. Ketentuan Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia	48
C. Presidential Threshold Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	53
D. Ketentuan Sistem Presidential Threshold Setelah Ada Putusan MK No. 70/PUU-XV/2017	57
BAB IV PRESIDENTIAL THRESHOLD BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF IMAM AL-MAWARDI TENTANG PENGANGKATAN KEPALA NEGARA.....	64
A. Analisis Sistem Presidential Threshold Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	64
B. Analisis Sistem Presidential Threshold Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Imam Al-Mawardi.....	69
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly. Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial. Jember: Universitas Negeri Jember, 2001.
- Al-Murtadho. Jalinan dan Negara Dalam Islam. Lampung: IAIN Raden Intan, 2012.
- Al-Mawardi, Imam. Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam. Jakarta: Darul Falah, 2007.
- Al-Mawardi, Imam. Adab *Ad-dunya Wa 'ad-Din*. Jakarta: Alifia Books, 2020.
- Al-Mawardi, Imam. An-Nukat Wa-'al-Uyun Fi Tafsir *Al-Qur'an Al-Karim*. Libanon: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 1987.
- Al-Mawardi, Imam. Al-Ahkam As-Sulthaniyah. Al-Kuwait: Maktabah Daru Ibn Qutaibah, 1989.
- Al-Mawardi, Imam. Al-Hawi Al-Kabir. Bairut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1994.
- Al-Zarkali, Khayr Al-Din. Al-*'A'lam*. Bairut: Dar Al Ilm Li Al Malayin, 1992.
- Al-Dzhabi, Muhammad bin Ahmad bin Ustman. *Siyarul A'lam An-Nubala'*. Bairut: Muassasah Al-Risalah, 1986.
- Azhar, Muhammad. Filsafat Politik: Perbandingan Antara Islam dan Barat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Akmal, Sejarah Kebudayaan Islam 2. Pekanbaru: I Media, 2014.
- Ali Mudor, Yunus. Kehidupan Nabi Muhammad Saw dan Amirul Mukminin Ali bin Abi *Thālib*. Semarang: Asy Syifa, 1992.
- Aziz Dahlan, Abdul. Ensiklopedia Hukum Islam. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Al-Rasid, Harun. Pengisian Jabatan Presiden. Jakarta: Grafiti, 1999.
- Abazhah, Nizar. Sahabat Muhammad. Jakarta: Zaman, 2014.
- Ali, Sayed Amir. A Short History of The Saracent. New Delhi: Kitab Bavan, 1991.
- Anwar C. Teori dan Hukum Konstitusi: Paradigma Kedaulatan Dalam UUD 1945 Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara. Malang: Setara Perss, 2015.

- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Djazuli, Ahmad. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kencana Media Group, 2005.
- Efendy, Mochtar. *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001.
- Hayyie Al-Khattami, Abdul, and Kamaluddin. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Hussain, Syekh Syaukat. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Ibrahim Hassan, Hassan. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Yogyakarta: Penerbit Kota Kembang, 1989.
- Ibrahim Hasan, Hasan. *Tarikh Al-Islam*. Kairo: Dar Al-Fikr, 1985.
- Iqbal, Muhammad, and Nasution, Amin Husein. *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Kementrian Dalam Negeri. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum*. Kementrian Dalam Negeri, 2016.
- Mashad, Dhurorudin. *Korupsi politik, Pemilu dan Legistimasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1999.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- M. Echols, John, and Shadily, Hassan. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Mahkamah Konstitusi RI. *Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern Dan Terpercaya*, Cetak Biru: Mahkamah Konstitusi RI, 2004.
- Nur Fuad, Nur Mufid. *Beda Al-Kamus Sulthaniyyah Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abbāsiyah*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2000.
- Nata, Abudin. *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2001.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah 'Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020.

- Pamungkas, Sigit. Perihal Pemilu. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol, 2009.
- Qadim Zallum, Abdul. Pemikiran Politik Islam. Pasuruan: Al Izzah, 2001.
- Rais, Dhiauddin. An-Nazhariyatu As-Siyasatu Al-Islamiyah. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Rasyid Thālib, Abdul. Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Soekant, Soerono, and Mamudji, Sri. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2001.
- Situmorang, Jubai. Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Sjadzali, Munawir. Islam dan Tata Negara. Jakarta: INIS, 1991.
- Siahaan, Maruarar. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Tutik, Titik Triwulan. Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Tutik, Titik Triwulan. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Watt, W. Montgomery. Kejayaan Islam: Kajian Kritis Dari Tokoh Orientalis. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1990.
- Yatim, Baderi. Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Yusuf Musa, Muhammad. Nidham Al-Hukm Fil Islam. Kairo: Dar Al Kitab Al Arabiy, 1974.
- Y. Stefanus, Kotan. Perkembangan Kekuasaan Pemerintah Negara. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1998.

B. Skripsi dan Thesis

- Asrullah, "Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia: Dimensi Konstitusi dan Presidensialisme" Thesis, Universitas Hasanuddin, 2021.
- Bahru Rozaq, Muhammad. "Analisi Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Ketentuan Presidential Threshold Dan Parliamentary Threshold Menurut UU No 7 Tahun 2017 Pasca Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017 Dan No. 20/PUU-XVI/2018." Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020.

Putra, Anggar “Presidential Threshold Sebagai Open Legal policy Dalam Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Hukum Islam” Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2021.

Rofi'ah, Siti Zahrotul. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Presidential Threshold Berdasarkan Undang-undang Penentuan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Sarianni. “Studi Komparasi Pemilihan Kepala Negara Menurut Fiqh Siyasah dan Hukum Tata Negara Indonesia.” Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2018.

C. Jurnal

Agus Dimiyati, Junaedi. “Hakikat Dan Fungsi Negara: Telaah Atas Persoalan Kebangsaan Di Indonesia.” *Logiks: Journal of Multidisciplinary Studies* 11, no. 1 (2020): 17.

Baskoro, Aji. “Presidential Threshold di Indonesia Dalam Perspektif Masalah Mursalah” *UIN Sunan Kalijaga: Jurnal Legislatif* 2 no. 2 (2019): 2.

Fadjar, A. Mukhtie. “Pemilu Yang Demokratis dan Berkualitas.” *Universitas Islam Riau: Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 4.

Fadillah Fitra, Ade. “Analisis Yuridis Ketentuan Presidential Threshold Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum.” *Universitas Riau: Jurnal Online Mahasiswa* 4, no. 2 (2017): 7.

Hanif, David. “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah.” *Universitas Islam Indonesia: Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 154.

Khasanofa, Auliya. “Pemilihan Presiden Indonesia Pasca Amandemen Berbasis Ideologi Pancasila.” *Universitas Muhammadiyah: Jurnal Hukum Ransendental* (2005): 129.

Sudirman. “Kedudukan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial.” *Universitas Brawijaya*: (2013): 10.

D. Artikel Majalah

Adhari, Agus. “Eksistensi Presidential Threshold Pada Pemilihan Umum Serentak 2019”. *Researchgate.net*, Maret 21, accessed November 25, 2022, https://www.researchgate.net/publication/299537176_Eksistensi_Presidential_Threshold_Pada_Pemilihan_Umum_Serentak_2019.

Asshiddiqie, Jimly. “Pemilihan Umum Serentak dan Penguatan Sistem Pemerintahan.” *Jimly.com*, accessed November 30, 2022, http://www.jimly.com/makalah/namafile/173/PEMILIHAN_UMUM_SERENTAK.pdf

E. Internet

“Wikipedia,”Presiden Indonesia, September 10, 2022, accssed 14 Oktober 2022,
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Presiden_Indonesia.

F. Undang-Undang dan Putusan

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XV/2017



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A